

| News Title: Kepala Bappebti Ingatkan 2L dalam Transaksi Aset Crypto   |                            |
|---|----------------------------|
| Media Name : hallo.id   | Journalist : Toha Almansur |
| Publish Date: 07 October 2022   | Tonality : Positive        |
| News Page : 1   | News Value : 1,500,000     |
| Resources : Didid Noordiatmoko (Plt<br>Kepala Badan Pengawas<br>Perdagangan Berjangka Komoditi<br>(Bappebti) Kementerian Perdagangan<br>RI) | <b>Ads Value</b> : 500,000 |
| Section/Rubrication : Kabar   | Topic : kripto             |

## Kepala Bappebti Ingatkan 2L dalam Transaksi Aset Crypto

A Toha Almansur - Jumat, 7 Oktober 2022 | 22:17 WIB





Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko ingatkan hari hati dan teliti dalam transaksi aset crypto ketika menerimca udiensi PJMI (PJMI)

HALLO JAKARTA - Dalam melakukan investasi dan transaksi dalam aset crypto, masyarakat mesti berhati-hati.

Masyarakat meski memahami benar apa itu aset crypto dan dan mekanisme perdagangannya sebelum melakukan transaksi dan investasi.

Pesan tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI Didid Noordiatmoko saat menerima audiensi Persatuan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) di Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Investasi aset crypto juga harus melihat risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga karena aset crypto sifatnya fluktuatif

"Jika ada penawaran investasi dengan iming-imimng imbalan tinggi, kuncinya 2 L, Legal dan Logis," tegas Didid.

Didid menjelaskan, investor harus melihat legalitas perusahaan dan izin dari Bapebbti. "Kalau tidak izin jangan diikuti," ujarnya.

Aspek L kedua yakni logis, artinya secara rasional imbal hasilnya masuk akal atau tidak.

"Jika ada yang menawarkan imbal hasilnya sampai minimal 10 persen bahkan lebih setiap bulannya, itu sudah tentu tidak logis, Sukuk Negara saja itu yang sudah fix saja ditetapkan 5,1 persen dalam satu tahun," ucop dia.

Crypto di Indonesia adalah sebuah aset atau komoditas bukan merupakan alat pembayaran. Alat pembayaran yang sah secara undang-undang adalah mata uang Rupiah. Aset crypto adalah aset digital yang digunakan dalam instrumen investasi. Aset crypto sudah menjadi komoditi yang diperdagangkan pada bursa berjangka.

Didid juga mengingatkan agar masyarakat dapat berinvestasi melalui pedagang aset crypto yang memiliki tanda daftar dan diakui Bappebti. Juga menginvestasikan dana untuk jenis aset crypto yang telah diatur Bappebti.

"Terdapat lebih 20 ribu jenis aset crypto di dunia. Hanya 383 jenis yang kami nilai relatif aman. Di luar 383 menjadi ilegal. Sementara saat ini ada 25 perusahaan perdagangan aset crypto yang diakui Bappebti dan hanya boleh memperdagangkan 383 jenis aset crypto ini," ujarnya.

Sedangkan dari total 25 perusahaan yang terdaftar di Bappebti, hanya 17 perusahaan yang aktif melakukan perdagangan aset crypto, sedangkan 8 perusahaan lainnya belum aktif.

"Kami akan pantau terus, kalau (perusahaan) tidak aktif menjalankan perdagangan aset crypto maka akan kami tarik izinya," tambahnya.

Didid menyarakan agar masyarakat melakukan investasi yang dipakai adalah dana yang diperoleh secara legal serta bukan dana untuk kebutuhan sehari hari

Didid mengungkapkan minat masyarakat investasi crypto terus meningkat. Bahkan Indonesia juga masuk salah satu negara yang cepat mengadopsi pengaturan crypto.

"Perdagangan aset crypto di Indonesia menjadi bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang. Untuk itu, kami menilai perlu adanya pengawasan yang baik untuk menjaga agar kondisi perdagangan aset crypto di Indonesia tetap kondusif," ujarnya.

Sebagai regulator aset crypto, Bappebti turut mengatur aset yang diperdagangkan dan masuk ke whitelist sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset crypto di Bursa Berjangka pasal 3.

Ketentuan yang tercantum yaitu berbasis distributed ledger technology berupa aset crypto to utilitas (utility crypto) atau aset crypto beragun aset (crypto backed asset), dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan Bappebti.

Adapun hasil penilaian dengan AHP menggunakan sejumlah indikator seperti nilai kapitalisasi pasar aset crypto, masuk dalam transaksi bursa aset crypto besar di dunia, manfaat ekonomi, dan penilaian risiko, antara lain risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Berdasarkan data Bappebti, transaski aset crypto di Indonesia memang berkembang pesat. Tahun 2021 nilai transaksinya mencapai Rp859,4 triliun, naik 12 kali lipat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 64,9 triliun.\*